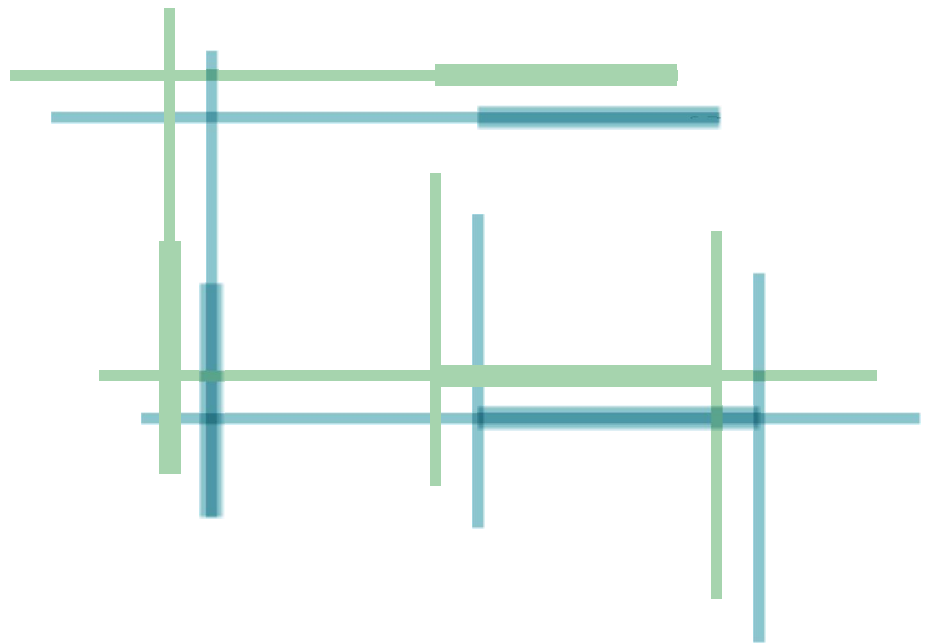




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2019



Jalan Antasari No.06 Telp / Fax. (0567) 21644
PUTUSSIBAU 78711



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 -2021.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini.

Putussibau, 2018
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
NIP. 19650129 198603 1 009



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perikanan secara umum merupakan bagian dari pembangunan Nasional, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kapuas Hulu cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat penting. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha atau 3,27% dari luas perairan umum Indonesia (13,3 juta ha) yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan potensial dengan beragam jenis sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya dimana memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya terutama dari produksi ikan air tawar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004



tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi/Nasional. Dengan tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat



diatasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD dan RKPD adalah sebagai dasar Dinas Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 mengacu Kepada, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan diantaranya sbagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor:25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
4. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



7. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No. no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKP

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan acuan dalam menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD serta segenap komponen dan lapisan masyarakat termasuk dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing SKPD bersipat sinergis dan koordinatif.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk memahami dan menilai arah kebijakan pembangunan selama periode satu tahun anggaran serta sebagai pedoman dalam menentukan arah, strategi maupun program prioritas kegiatan pembangunan baik sektoral maupun fungsional, secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perikanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.



5. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPDP terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasikan jumlah program dan jumlah kegiatan.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif
- BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Kesimpulan.



BAB II

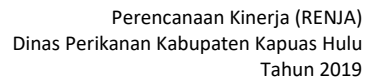
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun (tahun berjalan/n-1)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2	4			Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian										
				Urusan Kelautan dan Perikanan										
2	4	4		Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan										
2	4	4	1	Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perairan budidaya dan perairan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana	1. Produksi Perikanan:									
					a. Hasil perikanan budidaya (ton)	122.260	16.150,17	17.960	17.923,19	99,80	19.080	53.153,36	43,48	
					b. hasil perikanan tangkapan (ton)	102.625	18.548,70	18.020	31.494,71	174,78	30.980	81.023,41	78,95	



				produksi perikanan	c. Konsumsi Ikan (kg/kapita)	39,50	37	37	37	100,00	37,50	37,00	93,67	
					2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	40	43	40	93,02	46	40,00	80,00	
				PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										
				1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah pengadaan benih dan pakan	3.85 juta benih dan 250 ton pakan		500.000 benih dan 20 ton pakan	638.000 ekor untuk pakan 43 ton	78,37	700.000 benih dan 50 ton Pakan			
					Jumlah kelompok yang terbina	418 kelompok		150 Kelompok	85 kelompok	176,47	165 kelompok			
				2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan										
				- Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias dan Ikan Konsumsi Lokal	Kerjasama yang terjalin dengan Peneliti	9 Kerjasama		3 Kerjasama	3 kerjasama	100,00	3 kerjasam a			
				- Peningkatan sarana dan Prasarana BBI Kelansin	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	25 Paket		5 Paket	5 paket	100,00	5 paket			
					Jumlah benih yang dihasilkan	2.750.000 ekor		100.000 ekor	193.968 ekor	193,97	120.000			
					Jumlah PAD dari sektor penjualan benih	1.370.000.000		120.000 .000	165.672.5 00	138,06	130.000. 000			
				3. Pertemuan Teknis Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang meningkat Pengetahuannya	200 orang		40 orang	48 orang	120	40 orang			
				4. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR	Peningkatan Produksi benih ikan	500.000 ekor benih		60.000 ekor	130.000 ekor	217	100.000			
				6. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan Lingkungan	kegiatan yang di laksanakan	5 kegiatan		1 Keg	1 kegiatan	100	1			



				7. Pembinaan CPIB dan CBIB	Sertifikasi Kelompok Pembudidaya ikan	5 Sertifikasi Kelompok		-	-	-	-			
				8. Pengelolaan Unit Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan Hias Endemik	Ikan Hias Endemik yang dibudidayakan	2 jenis		1 Jenis	1 jenis	100	1 jenis			
				9. Pembinaan Mutu Pakan dan Obat-obatan	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilannya dalam Mutu Pakan dan Obat-obatan	30 kelompok		-	-	-	-			
				PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										
				1. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	102.625 ton		31.063 ton	31.494 ton	101,38	30.980,00			
				- Pengadaan Pukat Gilnet	Jumlah pengadaan pukat gilnet	3.000 unit		800 unit	1.173 unit	146,62	700 unit			
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	40 Unit		-	-	-	10 unit			
				- Pengadaan Speed Rukun Nelayan BBG	Jumlah pengadaan speedboat guna peningkatan pendapatan nelayan	20 Unit		-	-	-	8 unit			
				- Pengadaan cool box	Jumlah Pengadaan coolbox	340 Unit		-	-	-	50 unit			
				- Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan	Jumlah balai pertemuan yang dibangun	1 Unit		-	-	-	-			
				2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan										
				- Operasional dan Kegiatan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	7 TPI		7 TPI	7 TPI	100,00	7 TPI			
				- Pembangunan Lanting TPI	Jumlah Lanting TPI	1 Paket		1 paket	0		-			



					Jumlah PAD dari penarikan retribusi TPI			60.000.000	118.667.000	197,78	90.000.000			
				3. Pengembangan Statistik dan Informasi Perikanan Tangkap	Tersedianya Dokumen statistik perikanan tangkap	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen			
				4. Pendataan Nelayan	Jumlah nelayan yang terdata	4500 orang		1000 orang			1000 orang			
				5. Pertemuan teknis rukun nelayan	Jumlah Nelayan yang mengikuti pertemuan	200 orang		40 orang	-	-	40 orang			
				Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan										
				1. Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dan penanganan pasca panen	Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan									
				- Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan mutu olahan	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana peningkatan mutu	67 Paket		5 paket	3 paket	60,00	17 paket			
				- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran	Jumlah sarana Pemasaran	16 Paket		1 paket						
				2. Promosi hasil produksi unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi keluar	20 paket		4 paket	2 paket	50,00	4 paket			
					Jumlah pengusaha yang menjalin kerjasama	10 pengusaha		-	-	-	3			
				3. Pengawasan Mutu dan kapasitas produk pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	53 kelompok		10 Kelompok	3 kelompok	30,00	8 kelompok			
				4. Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan										



				- Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	200 kelompok		25 kelompok	10 kelompok	40,00	25 kelompok			
				- Magang studi banding dan pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Jumlah pengolah hasil yang diberangkatkan studi banding dan pelatihan	14 orang		3 orang	2 orang	66,66	-			
				5. Pembinaan kelompok penerima PUMP Pengolah hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil yang terbina	50 kelompok		10 kelompok	-	-	-			
				6. Pertemuan Teknis bagi kelompok pengolah hasil perikanan	jumlah kelompok yang mengikuti	200 kelompok		40 kelompok	-	-	-			
				7. pengukuhan tim FORIKAN	pengurus yang dikukuhkan	4 pengurus		1 pengurus	1 pengurus	100,00	2 pengurus			
				8. Pengawasan Mutu dan Kapasitas Produk Pengolahan Hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil	53 kelompok		10 kelompok	4 kelompok	40,00	-			
				9. Pengembangan statistik dan informasi perikanan pengolahan hasil perikanan	data/ dokumen yang tersedia	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	-			
				Program pengembangan kawasan budidaya air tawar										
				1. Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah KJA dan kolam masyarakat/ percontohan	160 unit		16 unit	25 unit	156,25	34 unit			
				Program pengembangan SDM dan kelembagaan perikanan										
				1. Pembinaan kelompok P2WKSS	Jumlah kelompok yang terbina	5 lokasi Pembinaan		1 lokasi/ tahun	1 lokasi/ tahun	100	1 lokasi/ tahun			
				2. Pekan Daerah	Partisipasi kegiatan	10 orang		2 orang	4	200	2			



				3. Gelar Teknologi	Teknologi tepat guna	5 kegiatan		1 kegiatan	-		1 kegiatan			
				4. Pengembangan Statistik dan informasi kelembagaan kelompok perikanan	Data/ dokumen Kelompok Perikanan	20 Dokumen		-	-	-	-			
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian sumber daya perikanan										
				1. Pengelolaan sumber daya ikan										
				- cetak buku juknis ikan lokal	jumlah buku	180 buku		80 buku	-	-	-			
				- Co- management berbasis masyarakat	jumlah Desa Percontohan	9 desa		-	-	-	-			
				- Inventarisasi dan pendataan Danau Lindung	dokumen yang tersedia	1 dokumen		-	-	-	-			
				- Panen Ikan di Danau Lindung	kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan		-	-	-	-			
				- Pembangunan prasarana di Danau lindung (lanting dan tenda permanent)	Terbangunnya lanting dan tenda permanen	2 paket		-	-	-	-			
				2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan	Operasional Pengawasan dan pengendalian	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan		100	-		
				3. Penguatan kelembagaan kelompok pengawas	kemandirian kelompok pengawas	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan		-			
				4. Penanggulangan aktivitas Ilegal Fishing di kabupaten Kapuas Hulu	semakin berkurangnya aktivitas ilegal fishing	80%		40%	40%		-			
				5. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengawasan										
				- Pengadaan Speed Pengawas 40 PK	tersedianya Speedboat	1 unit		-	-	-	-			



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

				- Pembangunan Pos Pengawasan	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		1,00	-	-	-			
				- Pembangunan Shelter pos Pengawas	Terbangunnya shelter pos pengawasan	1 unit		1,00	-	-	-			
				- Pos Pengawasan Danau Lindung	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		-	-	-	-			
				- Pendopo Danau Lindung Entibab	Terbangunnya Pos Pengawasan	2 unit		1,00	-	-	-			
				- Pendopo Danau Lindung Bagut	Terbangunnya Pos Pengawasan	1 unit		-	-	-	-			
				- Pengadaan Sarana Public Awarenes Campaign Pengawasan Perairan Umum Kab. KH.	tersedianya sarana Public Awarenes Campaign	1 paket		-	-	-	-			
				- Pengadaan Perlengkapan Pokmaswas	tersedianya perlengkapan pengawas	2 unit		-	-	-	-			



Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala teknis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Beberapa kendala dan hambatan serta permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan tahun lalu, diantaranya yakni:

1. Sumber Daya Aparatur Perikanan meliputi
 - Kemampuan SDM Aparatur Perikanan
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berkerja optimal
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - Masih banyaknya Penangkapan ikan yang cenderung tidak ramah lingkungan yaitu menggunakan alat-alat tangkap yang dilarang
 - Gejala tangkap yang berlebihan (Over Fishing)
 - Kerusakan Sumber Daya Ikan (SDI)
 - Masih adanya pelanggaran yang belum tertangani secara tuntas terhadap kejadian di perairan umum
 - Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
3. Perikanan Budidaya
 - Ketersediaan benih baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung UPR
 - Kemampuan SDM Masyarakat pembudidaya masih terbatas
 - Terbatasnya akses permodalan
 - Minimnya jumlah sarana budidaya (Kolam/Keramba)
 - Luasnya wilayah binaan, beratnya medan lokasi budidaya



Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kapuas Hulu secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, yang meliputi :

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikanan Kepala Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan T.A 2017 - 2021

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	C	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya	7	7	8	8,5	10	15	15
3	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya	5	5	7	10	15	20	20
4	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya	1	1	2	3	4	5	5



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			C	B	B	BB	C	C	B	BB	
II	Persentase nelayan yang meningkat pendapatannya			7	8	8,5	10	7	7	8,5	10	
III	Persentase pembudidaya yang meningkat pendapatannya			5	7	10	15	5	5	10	15	
IV	Persentase pengolah yang meningkat pendapatannya			1	2	3	4	1	1	3	4	



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan perencanaan kinerja serta strategis membutuhkan suatu gambaran tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.



Guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. Isu strategis tingkat OPD:

- 1) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2) Rendahnya pendapatan nelayan tangkap disektor Hulu.
- 3) Rendahnya pendapatan pembudidaya disektor Hulu.
- 4) Rendahnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan disektor Hilir (Pengumpul, distributor, Jasa Angkutan/Logistik ikan, Pengolah/Pedagang ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.

b. Isu strategis tingkat Bidang:

- 1) Rendahnya kontribusi UPR /Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 2) Belum optimalnya kontribusi Balai Benih Dinas dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan komunitas,
- 3) Rendahnya Jaminan Ketersediaan Pasokan ikan yang berkualitas. stabil dan hanya yang terjangkau pada tingkat konsumen (Rumah Tangga dan unit Pengolah Hasil ikan),
- 4) Berkurang bahkan menghilangnya beberapa Jenis ikan Endemik Kualitas ekspor dan atau bernilai ekonomi Tinggi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga bahwa Perencanaan pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan, tentunya Dinas Perikanan harus melakukan Review Terhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan



kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	UMUM				2.661.083.000	UMUM				2.966.867.400	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.935.044.700	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.188.732.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan			5.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan			5.050.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Perikanan			99.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Perikanan			69.720.000	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perikanan			6.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Perikanan			6.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan			112.380.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perikanan			113.580.000	
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan			86.876.200	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Dinas Perikanan			93.413.600	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perikanan			4.500.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perikanan			14.200.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan			40.132.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan			40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Dinas Perikanan			18.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan	Dinas Perikanan			15.265.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

Penggandaan					Penggandaan					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan			13.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan			3.625.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan			127.885.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan			77.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dinas Perikanan			2.520.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dinas Perikanan			2.520.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan			7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan			19.800.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perikanan			118.750.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Perikanan			108.000.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perikanan			603.618.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Perikanan			780.253.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dinas Perikanan			106.285.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dinas Perikanan			207.362.000	
Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Perikanan			100.488.500	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Perikanan			165.793.500	
Penyediaan adminitrasi	Dinas Perikanan			18.390.000	Penyediaan adminitrasi	Dinas Perikanan			9.905.000	
Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Perikanan			16.215.000	Penyusunan RKA dan DPA	Dinas Perikanan			306.745.000	
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Dinas Perikanan			438.185.000	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Dinas Perikanan			10.000.000	
Penyediaan Jasa Publikasi	Dinas Perikanan			8.250.000	Penyediaan Jasa Publikasi	Dinas Perikanan			140.500.000	



	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	72.200.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	88%	156.700.000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perikanan			72.200.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perikanan			77.500.000	
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Perikanan			79.200.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4%	71.450.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4%	88.450.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perikanan			71.450.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perikanan			88.450.000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan	100%	582.388.300	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan	100%	532.985.300	
			Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	90%				Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	90%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan			6.635.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan			6.635.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perikanan			12.165.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perikanan			12.165.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Dinas Perikanan			9.840.000	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Dinas Perikanan			9.840.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Dinas Perikanan			61.530.000	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Dinas Perikanan			55.810.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Dinas Perikanan			255.755.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Dinas Perikanan			240.096.000	
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Dinas Perikanan			5.390.000	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Dinas Perikanan			5.390.000	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Dinas Perikanan			2.521.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Dinas Perikanan			2.521.000	
	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Dinas Perikanan			121.918.300	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Dinas Perikanan			123.843.300	
	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Perikanan			106.634.000	Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Dinas Perikanan			76.685.000	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.926.777.000	KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.395.460.500	
	Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap		Angka Produksi ikan tangkap meningkat	41.000 Ton	1.525.725.000	Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap		Angka Produksi ikan tangkap meningkat	41.000 Ton	1.923.708.000	
	Pemulihan Sumberdaya Ikan				76.770.000	Pemulihan Sumberdaya Ikan				73.275.000	
	Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				101.285.000	Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				407.410.000	



	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				156.725.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				103.295.000	
	Perlindungan nelayan Kecil				43.145.000	Perlindungan nelayan Kecil				39.675.000	
	Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				1.147.800.000	Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				1.300.053.000	
	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Budidaya	25.263 Ton	3.274.429.500	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Budidaya	25.263 Ton	5.024.786.000	
	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				2.746.644.800	Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				3.982.718.800	
	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				527.784.700	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				1.042.067.200	
	Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidayaan		Produksi UPR		172.685.500	Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidayaan		Produksi UPR		164.420.500	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				172.685.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				164.420.500	
	Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin		Jumlah benih ikan yang diproduksi	429.0000 Ekor	1.308.500.000	Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin		Jumlah benih ikan yang diproduksi	429.0000 Ekor	1.206.722.000	
	Pengelolaan Operasional UPT- Benih Ikan (BI) Kelansin				685.958.000	Pengelolaan Operasional UPT- Benih Ikan (BI) Kelansin				670.742.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

	Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				469.042.000	Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				382.480.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				153.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				153.500.000	
	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah		Angka pasokan ikan (%)	2,88	2.488.001.000	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah		Angka pasokan ikan (%)	2,88	2.169.695.000	
	Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				108.580.000	Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				93.500.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan TPI				364.477.000	Pengembangan dan Pengelolaan TPI				354.827.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				2.014.944.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				1.721.368.000	
	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan		Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah	3 Jenis	741.876.000	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan		Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah	3 Jenis	502.470.000	
			Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan	3%				Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan	3%		
	Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				120.847.000	Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				108.107.000	
	Promosi Hasil Perikanan				128.518.000	Promosi Hasil Perikanan				98.657.000	
	Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				112.150.000	Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				112.150.000	



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

	Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				380.361.000	Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				183.556.000	
	Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)		Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik		415.560.000	Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)		Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik		403.659.000	
	Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				193.280.000	Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				192.210.000	
	Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				56.315.000	Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				53.425.000	
	Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)				65.395.000	Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)				58.124.000	
	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				100.570.000	Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				99.900.000	
	JUMLAH				12.587.860.000	JUMLAH				14.362.327.900	



2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terus membuka diri terhadap kritik, saran dan masukan dari para stekholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk menuju program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, seperti tersaji dalam Tabel T.C-32.



Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
	Pengadaan Calon Induk Ikan Arwana di Desa Laut Tawang Kec. Suhaid	Kec. Suhaid		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Dusun Pulan Pagun I, Desa Semangut Kec. Bunut Hulu	Kec. Bunut Hulu		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Dusun Sungai Terus Timur Desa Sejahtera Mandiri Kec. Hulu Gurung	Kec. Hulu Gurung		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Dusun Sungai Terus Barat Desa Sejahtera Mandiri Kec. Hulu Gurung	Kec. Hulu Gurung		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Pokdakan Dusun Kantuk Balau Desa Kantuk Bunut Kec. Puring Kencana	Kec. Puring Kencana		Rp 40.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Pokdakan Dusun Nasak Desa Sungai Antu Kec. Puring Kencana	Kec. Puring Kencana		Rp 40.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Lele untuk Pokdakan Mandiri Kelurahan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan	Kec. Putussibau Selatan		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias untuk Pokdakan Mina Barokah Dusun Menin Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung	Kec. Boyan Tanjung		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Bawal Indah Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 78.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Nila Lestari Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 75.000.000	



	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Kelompok PKK Selama Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 75.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Nila Super Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 75.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Sisik Merah Kerangan Panjang Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 75.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Belibis Desa Mawan	Kec. Pengkadan		Rp 99.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias untuk Pokdakan Sisik Naga Desa Mentebah Kec. Mentebah	Kec. Mentebah		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Ikan Hias untuk Pokdakan Bangan Jaya Desa Mentebah Kec. Mentebah	Kec. Mentebah		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan untuk Kecamatan Pengkadan dan Boyan Tanjung	Kec. Boyan Tanjung dan Pengkadan		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Kolam Percontohan Desa Lanjak Kec. Batang Lupar	Kec. Batang Lupar		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Dusun Dusun Ukit-ukit dan Dusun Pulan Ds. Batu Lintang Kec. Embaloh Hulu	Kec. Embaloh Hulu		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan untuk Pokdakan Kecamatan Putussibau Utara	Kec. Putussibau Utara		Rp 150.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan untuk Pokdakan Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu		Rp 100.000.000	
	Pengadaan Induk Arwana Super Red untuk Pokdakan Kell. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Kec. Putussibau Utara		Rp 150.000.000	
	Pembuatan Kolam Percontohan dan Pemagaran POKDANKAN "Salat Bersatu" Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid	Kec. Suhaid		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Ikan Arwana Untuk Restocking Danau Lindung Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu		Rp 200.000.000	



	Pengadaan Ikan Arwana Super Red kepada Sanggar Melayu Senandung Bergoyang Desa Tani Makmur Kec. Hulu Gurung	Kec. Hulu Gurung		Rp 56.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Desa Mentebah Kiri Kec. Mentebah	Kec. Mentebah		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Karya Kita Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu	Kec. Bunut Hulu		Rp 65.000.000	
	Pengadaan Bibit Ikan Hias Arwana untuk Pokdakan Kelompok Muara Kasih Desa Bakong Permai Kec. Bunut Hulu	Kec. Bunut Hulu		Rp 60.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Tani Karya Usaha Desa Nanga Ret Kec. Boyan Tanjung	Kec. Boyan Tanjung		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Desa Melapi, Kec. Putussibau Selatan	Kec. Putussibau Selatan		Rp 200.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan Patin untuk Pokdakan Desa Urang Unsa, Kec. Putussibau Selatan	Kec. Putussibau Selatan		Rp 200.000.000	
	Program Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap				
	Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				
	Pengadaan Speedboat Pengawasan untuk Pokmaswas Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir	Kec. Embaloh Hilir		Rp 130.000.000	
	Pengadaan Coolbox Kelompok Nelayan "Tangkap Tanjung Dalam III" Desa Dalam Kec. Selimbau	Kec. Selimbau		Rp 75.000.000	
	Pengadaan Peralatan Penanganan Ikan untuk KUB Tanjung Kapuas Desa Empangau Kec. Bunut Hilir	Kec. Bunut Hilir		Rp 50.000.000	
	Pengadaan Ikan Arwana Untuk Restocking Danau Lindung Kabupaten Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu		Rp 160.000.000	



	Pengadaan Ikan Arwana Untuk Restocking (Danau Lindung/Suaka Perikanan) Kec. Jongkong dan Embaloh Hilir	Kec. Jongkong dan Embaloh Hilir		Rp 200.000.000	
	Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin				
	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - Benih Ikan (BI) Kelansin	UPT BI Kelansin		Rp 75.000.000	
	Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah				
	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				
	Pembangunan Tempat Parkir TPI Kec. Putussibau Utara Tahap II	Kec. Putussibau Utara		Rp 150.000.000	
	Pembangunan Lanting TPI Kec. Jongkong	Kec. Jongkong		Rp 150.000.000	
	Program Penguatan daya Saing Produk Perikanan				
	Kegiatan : Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				
	Pengadaan Dandang/Kuali untuk Poklaksar Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara	Kec. Putussibau Utara		Rp 100.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang kemudian dituangkan dalam bentuk strategi pembangunan nasional yang kemudian terkait dengan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah:

Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah;
3. Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan.

Sedangkan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:



1. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik;
2. Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah;
3. Meningkatnya pasokan ikan yang berkualitas, stabil dan harga terjangkau di tingkat konsumen dan pengolah

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Kerja 2019 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Tahun 2019 adalah :

a. Program Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap

- 1) Pemulihan Sumberdaya Ikan
- 2) Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil
- 3) Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)
- 4) Perlindungan nelayan Kecil
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap

b. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

- 1) Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya
- 2) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

c. Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR



d. Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin

- 1) Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin
- 2) Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin

e. Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah

- 1) Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan TPI
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI

f. Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- 1) Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan
- 2) Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)
- 3) Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)
- 4) Promosi Hasil Perikanan

g. Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)

- 1) Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah
- 2) Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau
- 3) Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)
- 4) Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Program dan Kegiatan Prioritas tersebut diatas tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil Program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan, Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Indikator capaian Kinerja dan Pendanaan Dinas



Perikanan di Tahun 2019 serta Perkiraan Maju Rencana dinas Perikanan Tahun 2020 tergambar dalam tabel T-C.33 berikut ini



Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu**

OPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UMUM								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.935.044.700				2.080.110.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Kirim untuk 1 Tahun	Dinas Perikanan	30 Surat	5.800.000			30 Surat	5.050.000
		Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun		850 Lembar				850 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pemakaian telpon, Internet, listrik dan air	Dinas Perikanan	12 Bulan	99.000.000			12 Bulan	69.720.000
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pembiayaan ijin surat tanda nomor kendaraan dinas roda 4 Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	3 STNK	6.000.000			4 STNK	9.000.000



			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pengelola Keuangan Dinas Perikanan yang dianggarkan dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi	Dinas Perikanan	100%	112.380.000			100%	113.580.000
			Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dijaga	Dinas Perikanan	2241 M2	86.876.200			2241 M2	102.913.600
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Pemenuhan Service Peralatan Kerja	Dinas Perikanan	12 Bulan	4.500.000			12 Bulan	14.200.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor untuk 1 Tahun	Dinas Perikanan	15 Lembar	40.132.000			15 Lembar	38.108.500
				Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun		850 Lembar				850 Lembar	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Kartu Ucapan Hari raya, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan penjilidtan yang dise	Dinas Perikanan	100%	18.500.000			100%	15.265.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor 1 Tahun	Dinas Perikanan	100%	13.570.000			100%	3.625.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	50%	127.885.000			60%	66.990.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah refill tabung gas untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	12 Tabung	2.520.000			12 Tabung	2.520.000



				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Dinas Perikanan	12 Bulan	7.700.000			12 Bulan	19.800.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya makan minum harian pegawai, tamu dan biaya rapat untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	1 Tahun	118.750.000			1 Tahun	108.000.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	140 OK	603.618.000			140 OK	706.307.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun	Dinas Perikanan	153 OK	106.285.000			153 OK	144.838.000
3				Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kontrak yang di tandatangani dan dapat dilaksanakan	Dinas Perikanan	70 SPK	100.488.500			70 SPK	165.793.500
					Jumlah Kegiatan yang di serah terimakan		70 SPK				70 SPK	
				Penyediaan adminitrasi	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi yang disusun tepat waktu	Dinas Perikanan	Dokumen	18.390.000			Dokumen	35.000.000
				Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA serta DPPA Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	3 Dokumen	16.215.000			3 Dokumen	16.215.000
				Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Penyediaan honorarium tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Dinas Perikanan	17 Orang	438.185.000			17 Orang	438.185.000



				Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah iklan/ucapan yang di publikasikan	Dinas Perikanan	10 Iklan	8.250.000				5.000.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Dinas Perikanan	88%	167.606.000			80%	167.606.000
2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan	Dinas Perikanan	100%	167.606.000			100%	167.606.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Perikanan	4%	337.847.000			4%	70.606.000
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti/Pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	Dinas Perikanan	8 OK	337.847.000			8 OK	70.606.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan	Dinas Perikanan	100%	582.388.300			100%	537.908.000
					Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan	Dinas Perikanan	90%				90%	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP Dinas Perikanan yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	6.635.000			1 Dokumen	6.685.000



			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	12.165.000			1 Dokumen	5.995.000
			Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen keuangan yang dibuat tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	9.840.000			1 Dokumen	3.790.000
			Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Prosentase Aset BMN yang terdata dan dikelola	Dinas Perikanan	100%	61.530.000			100%	79.599.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Dinas Perikanan	6 Dokumen	255.755.000			6 Dokumen	227.944.000
			Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan penetapan Kinerja yang disusun dan tepat waktu	Dinas Perikanan	2 Dokumen	5.390.000			2 Dokumen	6.620.000
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Kegiatan Dinas Perikanan yang disusun dan tepat waktu	Dinas Perikanan	1 Dokumen	2.521.000			1 Dokumen	2.275.000
			Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyajian Data	Dinas Perikanan	1 Dokumen	121.918.300			1 Dokumen	205.000.000
			Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	-	Dinas Perikanan	0	106.634.000			0	0



				PERIKANAN							
				Program Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap	Angka Produksi ikan tangkap meningkat	Dinas Perikanan	41.000 Ton	210.000.000			41.200 Ton 178.055.000
				Pemulihan Sumberdaya Ikan				50.000.000			76.770.000
				Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil				20.000.000			101.285.000
				Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)				50.000.000			0
				Perlindungan nelayan Kecil				45.000.000			0
				Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap				45.000.000			0
				Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya	25.263 Ton	500.000.000			20.026 Ton 6.964.100.000
				Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				250.000.000			6.714.100.000



			Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar				250.000.000				250.000.000
			Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	Produksi UPR	Bidang Perikanan Budidaya	100%	50.000.000			100%	0
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR				50.000.000				0
			Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah benih ikan yang diproduksi	UPT BBI Kelansin	429.0000 Ekor	1.308.500.000				6.458.163.850
			Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				685.958.000				1.028.096.000
			Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin				469.042.000				750.000.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI)				153.500.000				4.680.067.850
			Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	Angka pasokan ikan (%)		2,88	2.488.001.000			4	10.153.000.000
			Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)				108.580.000				7.483.000.000



				Pengembangan dan Pengelolaan TPI				364.477.000				510.000.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI				2.014.944.000				2.160.000.000
				Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah		3 Jenis	741.876.000			4 Jenis	5.345.000.000
					Persentase pertumbuhan penjumlahan produk hasil perikanan		3%				5%	
				Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)				120.847.000				30.000.000
				Promosi Hasil Perikanan				128.518.000				927.000.000
				Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan				112.150.000				3.470.000.000
				Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)				380.361.000				918.000.000
				Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik			415.560.000				818.440.000



			Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah				193.280.000				540.000.000,0
			Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau				56.315.000				153.440.000,0
			Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)				65.395.000				-
			Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan				100.570.000				125.000.000,0



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program, dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakat pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi yang ada pada Dinas Perikanan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dimuat dalam Tabel 4.1 dibawah ini :



VISI		: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS			
MISI		: MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN			
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel, dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru 5. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 6. Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 7. Menyediakan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai 8. Melakukan pengukuran kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkala 	
2	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatnya produksi ikan tangkap	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan potensi/stok ikan tangkap di PUD 2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan 3. Meningkatkan partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan 4. Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan perikanan 5. Meningkatkan produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF 6. Menghentikan sementara secara bertahap mengenai cara penangkapan dan budidaya yang tidak lestari, sehingga populasi ikan meningkat 	
4	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat 2. Meningkatkan keterampilan pembudidaya 3. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya terpadu 4. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya berbasis CBF 5. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi 6. Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS, BBGR, Pemerintah Desa 7. Meningkatkan pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan 8. Mengidentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu 	



Perencanaan Kinerja (RENJA)
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

5	Meningkatnya kesejahteraan pengolah	Meningkatnya ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk	Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/ sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksanaan yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan 2. Meningkatkan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk 3. Meningkatkan kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha 4. Meningkatkan kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha 5. Meningkatkan ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengolah 6. Meningkatkan mutu produk perikanan
6	Meningkatkan kontribusi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi benih dan pakan unit pembenihan rakyat (UPR/UP2R) dan Pembudidaya	Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan prasarana/sarana produksi benih untuk UPR dan Pokdakan 2. Meningkatkan keterampilan UPR dan Pokdakan dalam produksi benih dan pakan
7	Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit untuk Masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di Balai Benih	Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan (BI) Kelansin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi bibit dan intensitas inspeksi mutu produksi benih 2. Meningkatkan ragam/jenis ikan, pakan yang diuji coba/ produksi, pelayanan diagnosa penyakit/ penjabatan penyakit ikan dan pengamatan kualitas air 3. Melaksanakan pembangunan/ pengadaan baru atau peningkatan prasarana/sarana Balai Benih Ikan Kelansin 4. Tidak berkurang debit air masuk ke instalasi minimal 3 tahun ini, dan meningkatnya debit air masuk sekurang - kurangnya 3 tahun dari saat ini
8	Meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan	Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras sistem logistik ikan di koridor I,II dan III secara bertahap 2. Melaksanakan monitoring, evaluasi,investigasi pelaksanaan SLID 3. Melaksanakan pelayanan bongkar muat, pelelangan ikan, penarikan retribusi perikanan dan laporan data perikanan yang masuk pelabuhan semakin baik 4. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan baik baru atau peningkatan (rehabilitasi) sesuai dengan RUP yang telah ditetapkan
9	Mencegah berkurangnya keberagaman ikan endemik/ berpotensi langka dari kepunahan dan meningkatkan potensi ikan di PUD	Meningkatnya ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran 2. Memfasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama - sama 3. Melaksanakan penyusunan draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan 4. Meningkatkan peranserta POKMASWAS dan aparaturnya penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan



Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 100.200.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp 6.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 110.280.000
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 86.876.200
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 4.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 41.017.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.570.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 61.085.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rp 2.520.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.700.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 117.250.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 475.864.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 88.915.000
Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 108.039.500
Penyediaan adminitrasi	Rp 24.690.000
Penyusunan RKA dan DPA	Rp 16.215.000
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 456.185.000
Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 8.250.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 77.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 79.200.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 88.450.000



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.635.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 12.165.000
Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Rp 9.840.000
Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp 55.810.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Rp 240.096.000
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp 5.390.000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp 2.521.000
Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Rp 123.843.300
Fasilitasi Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 76.685.000
Pengembangan dan peningkatan produksi Perikanan Tangkap	
Pemulihan Sumberdaya Ikan	Rp 73.275.000
Pemberdayaan Ekonomi nelayan Kecil	Rp 407.410.000
Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)	Rp 103.295.000
Perlindungan nelayan Kecil	Rp 39.675.000
Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Rp 1.300.053.000
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
Peningkatan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Rp 3.982.718.800
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Rp 1.042.067.200
Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR	Rp 164.420.500
Program Pengembangan dan pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin	
Pengelolaan Operasional UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 670.742.000
Pengembangan Produksi UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 382.480.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin	Rp 153.500.000
Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	
Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	Rp 93.500.000
Pengembangan dan Pengelolaan TPI	Rp 354.827.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Rp 1.721.368.000



Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	
Peningkatan kualitas bimtek/pelatihan	Rp 112.150.000
Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)	Rp 183.556.000
Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (Pasca inkubasi)	Rp 108.107.000
Promosi Hasil Perikanan	Rp 98.657.000
Program Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)	
Domestikasi, penangkaran, dan budidaya spesies ikan endemik Berpotensi langka/punah	Rp 192.210.000
Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau	Rp 53.425.000
Penyusunan Raperda/Perda Pengelolaan dan Pengendalian Perairan Umum Daratan (PUD)	Rp 58.124.000
Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp 99.900.000
	Rp 13.927.053.400



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perikanan kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 ini disusun dalam rangka menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang mendasar adalah adanya integritas antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam satu keterpaduan gerak langkah operasional pembangunan perikanan guna mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dengan beraneka jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Perairan Umum atau yang lebih dikenal sebagai perairan pedalaman merupakan sumber daya perikanan yang sangat bernilai ekonomis tinggi. Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 450.257 ha yang terdiri dari danau dan sungai, dimana terdapat 115 danau dengan luas lebih dari 120.000 ha termasuk kawasan danau serta rawa Taman Nasional Danau Sentarum. Dari aspek ekonomi, kawasan Danau Sentarum dan sekitarnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan, baik bagi masyarakat setempat maupun daerah sekitarnya, terutama dari produksi ikan air tawar. Berkaitan dengan hal tersebut Untuk itu, Dinas Perikanan telah berupaya menyusun program perikanan, yang orientasinya tidak saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya tersebut secara bertanggungjawab sehingga dapat menjaga keseimbangan dan kelestariannya.

Mengacu kepada filosofi dari pembangunan itu sendiri, disadari bahwa pembangunan perikanan merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lebih dari itu, merupakan komitmen dan keyakinan kita, bahwa pembangunan perikanan juga



merupakan upaya bersama baik itu Pemerintah, DPRD dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pembangunan perikanan akan lebih berhasil apabila terjadi keterpaduan dan kerjasama seluruh stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perikanan. Tidak saja keterpaduan intra-instansi serta keterpaduan antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga keterpaduan dan dukungan penuh dari pihak lainnya, baik swasta, LSM, maupun masyarakat luas.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat dalam pembangunan sektor Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik dan berkelanjutan.

Putussibau, 2018
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
NIP. 19650129 198603 1 009